

# PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KEBERLANJUTAN PARIWISATA DI PANTAI TANJUNG SETIA, KABUPATEN PESISIR BARAT

Audy Oktavia<sup>1</sup>, Meitolo Hulu<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Univeristas Pelita Harapan, meitolo.hulu@uph.edu

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dengan menyoroti kolaborasi antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pariwisata dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung normatif dan berfokus pada destinasi yang telah berkembang, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara mendalam pola partisipasi konkret dan dinamika kolaborasi multipihak pada destinasi pesisir yang sedang berkembang. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui pemilihan 12 informan dilakukan untuk mendapatkan wawasan mendalam dari berbagai perspektif kunci masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah cukup representatif untuk mengungkap dinamika partisipasi dan pengelolaan destinasi secara komprehensif tanpa mengorbankan kualitas analisis kualitatif, termasuk pemerintah daerah, pengelola desa wisata, Pokdarwis, pemandu wisata, dan pelaku usaha, serta diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama pemangku kepentingan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terjadi dalam dua bentuk utama: ekonomi, melalui pengelolaan homestay, usaha kuliner/UMKM, jasa transportasi, pemanduan, dan penyewaan alat selancar; serta sosial, melalui kegiatan gotong royong, bersih pantai, dukungan event, dan menjaga keamanan pengunjung. Partisipasi paling dominan pada tahap pelaksanaan, sedangkan keterlibatan dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi masih terbatas dan bersifat informal. Manfaat ekonomi terlihat nyata namun belum merata, yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah usaha homestay, warung, dan jasa pemandu lokal serta bertambahnya pendapatan sebagian pelaku usaha pariwisata, cenderung lebih dirasakan oleh warga dengan modal dan jaringan usaha yang sudah ada. Peran pemerintah dan pelaku usaha sangat penting dalam pelatihan, penyediaan infrastruktur, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Secara praktis, pengelola pariwisata perlu memperkuat forum partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga lokal, serta memastikan distribusi peluang ekonomi yang lebih adil. Selain itu, diperlukan sistem monitoring berbasis indikator keberlanjutan agar pertumbuhan pariwisata tetap selaras dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** partisipasi masyarakat, pariwisata berkelanjutan, pengelolaan pesisir, pemberdayaan lokal

## ABSTRACT

*This study examines community participation in the management of Tanjung Setia Beach, Pesisir Barat Regency, Lampung, focusing on the collaboration between local communities, regional government, and tourism actors in realizing sustainable tourism. Unlike previous studies, which tend to be normative and focus on well-developed destinations, this research offers novelty by analyzing in depth*

*the patterns of concrete participation and the dynamics of multi-stakeholder collaboration in a developing coastal destination. A qualitative research method was employed, with data collected through purposive selection of 12 key informants to gain in-depth insights from multiple perspectives, including local communities, tourism actors, and government representatives, sufficient to reveal the dynamics of participation and destination management comprehensively without compromising qualitative analysis. Informants included regional government officials, village tourism managers, Pokdarwis (Tourism Awareness Group) leaders, tour guides, and business actors, complemented by focused group discussions (FGDs) with key stakeholders. The findings indicate that community participation occurs in two main forms: economic, through the management of homestays, culinary/SME businesses, transportation services, guiding, and surfboard rentals; and social, through communal work, beach cleaning, event support, and visitor security. Participation is most dominant at the implementation stage, while involvement in planning, monitoring, and evaluation remains limited and informal. Economic benefits are evident but unevenly distributed, as shown by the growth in homestays, local food stalls, and guiding services, with increased income mainly experienced by residents with existing capital and business networks. The roles of government and business actors are crucial in providing training, infrastructure, and coordination across stakeholders. Practically, tourism managers need to strengthen participatory forums that involve the community in decision-making, enhance local residents' skills and capacities, and ensure a more equitable distribution of economic opportunities. In addition, a monitoring system based on sustainability indicators is necessary to ensure that tourism growth remains aligned with environmental preservation and community well-being.*

**Keywords:** *community participation, sustainable tourism, coastal management, local empowerment*

## **PENDAHULUAN**

Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, memiliki potensi pariwisata pesisir yang signifikan, terutama destinasi pantai seperti Pantai Tanjung Setia dengan kunjungan wisatawan mencapai 21.061 pengunjung pada tahun 2024. Pantai ini terkenal dengan gelombang tinggi dan kuat sehingga menjadi daya tarik utama bagi peselancar domestik dan internasional (Kompas.id, 2025). Potensi ini telah mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan, terutama pada event-event selancar berskala internasional seperti *World Surf League (WSL) Krui Pro*, yang berdampak pada peningkatan okupansi akomodasi dan aktivitas ekonomi lokal di kawasan tersebut (Kompas.id, 2025).

Dalam konteks pembangunan pariwisata, pemanfaatan potensi wisata ini masih menghadapi tantangan dalam keterpaduan akses, fasilitas pendukung, serta distribusi kunjungan antar destinasi dalam kawasan, yang memerlukan strategi pengembangan yang lebih terkoordinasi dan berbasis tata kelola pariwisata berkelanjutan (Segara, 2025). Kajian terhadap pariwisata pesisir Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan destinasi yang tidak mempertimbangkan keterpaduan manajemen lintas pemangku kepentingan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap sistem sosial dan ekologi kawasan wisata tersebut (Segara, 2025).

Analisis data kunjungan wisatawan per unit wilayah menunjukkan adanya variasi pola kunjungan yang perlu menjadi dasar evaluasi kebijakan penguatan tata

kelola dan layanan destinasi berbasis karakter lokal dan kapasitas lingkungan (Segara, 2025). Meskipun adanya pertumbuhan kunjungan wisata, tidak semua kawasan di sekitar Pesisir Barat telah berperan secara optimal dalam sistem pariwisata kawasan, sehingga memerlukan perumusan strategi pengelolaan yang responsif terhadap kebutuhan komunitas setempat (Segara, 2025). Selain itu, dinamika lingkungan pesisir seperti akumulasi sampah dan tekanan terhadap sumber daya alam dapat memperburuk kualitas pengalaman wisatawan apabila tidak dikelola secara efektif (Steven, Nurul Fadilah, & Sutoyo, 2024).

Dalam kajian pariwisata berkelanjutan, partisipasi masyarakat lokal dipandang sebagai elemen penting untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata berbasis ekowisata dapat memperkuat keterlibatan komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam sekaligus meningkatkan pendapatan lokal (Maifizar, Natasya, & Angriani, 2025). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap destinasi, meningkatkan peluang pemberdayaan sosial dan ekonomi lokal (Maifizar et al., 2025). Studi lain di konteks pariwisata pesisir Indonesia menemukan bahwa partisipasi komunitas dalam mengelola destinasi pariwisata pantai berkontribusi pada pembentukan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, terutama melalui keterlibatan dalam kegiatan operasional, pemasaran, dan konservasi lingkungan (Sutiono et al., 2025).

Namun demikian, peran serta masyarakat dalam rantai nilai pariwisata di Pantai Tanjung Setia belum optimal, terutama dalam pengambilan keputusan strategis dan distribusi manfaat ekonomi secara adil, sehingga diperlukan evaluasi sejauh mana keterlibatan masyarakat terintegrasi dalam semua tahapan pengembangan destinasi (Renaldi & Murdianto, 2022). Penelitian empiris di Tanjung Setia juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan anggota kelompok sadar wisata setempat, memberikan bukti pentingnya peran komunitas dalam keberlanjutan ekonomi dan sosial destinasi (Renaldi & Murdianto, 2022). Selain itu, studi tentang dampak pariwisata terhadap masyarakat setempat menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata dapat berdampak pada perubahan sosial dan budaya, termasuk aspek sosial keagamaan di masyarakat Pekon Tanjung Setia, yang perlu menjadi perhatian dalam strategi pengembangan destinasi agar tidak menimbulkan disrupsi sosial yang merugikan komunitas lokal (Fatonah & Haryanto, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung untuk menganalisis mekanisme keterlibatan komunitas dan implikasinya terhadap keberlanjutan destinasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual terhadap literatur pariwisata berkelanjutan serta rekomendasi kebijakan yang relevan dengan tantangan dan peluang destinasi pesisir di Indonesia.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pariwisata**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup keterlibatan komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan destinasi wisata, yang berkontribusi secara langsung terhadap keberlanjutan sosial dan ekonomi

suatu wilayah (Wibowo & Belia, 2025). Studi empiris mengenai peran masyarakat dalam keberlanjutan pariwisata menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat berkorelasi positif dengan pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, termasuk peningkatan kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan lokal (Ridho et al., 2021). Penelitian di kawasan wisata di Bali menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan proses pengelolaan destinasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas implementasi pariwisata berkelanjutan, terutama bila didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal (Ariasri & Susianti, 2022). Dukungan kelembagaan, pelatihan kapasitas komunitas, serta perencanaan yang inklusif memperkuat peran serta masyarakat dalam konteks pengembangan destinasi wisata (Ariasri & Susianti, 2022).

Selain itu, literatur pariwisata berkelanjutan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat turut meningkatkan resiliensi destinasi terhadap tekanan sosial dan ekologis. Resiliensi ini mencakup kemampuan komunitas lokal untuk menyesuaikan diri terhadap fluktuasi arus wisata, perubahan regulasi, dan dinamika pasar, serta memperkuat peran mereka dalam menjaga identitas budaya dan integritas lingkungan pesisir (Ruiz-Ballesteros & del Campo Tejedor, 2020). Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat dalam pariwisata tidak hanya memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal dan mitigasi konflik sosial, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pelestarian budaya serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang semuanya merupakan komponen utama dalam tata kelola pariwisata yang resilien dan berorientasi masa depan (Wibowo & Belia, 2025; Ridho et al., 2021).

### **Partisipasi dalam Pengelolaan Destinasi**

Pengelolaan destinasi pariwisata modern menunjukkan pergeseran dari model hierarkis yang bersifat top-down menuju pendekatan *collaborative governance* yang lebih horizontal dan inklusif. Pendekatan ini menekankan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan pemerintah, komunitas lokal, sektor swasta, akademisi, dan media melalui forum kolaboratif, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme pengambilan keputusan berbasis deliberasi (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks pariwisata, kolaborasi lintas aktor dipandang penting untuk meningkatkan koordinasi, mengurangi konflik kepentingan, dan memastikan keberlanjutan pengelolaan destinasi (Baggio, Scott, & Cooper, 2010). Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* sangat bergantung pada desain mekanisme partisipasi yang jelas, termasuk prosedur operasional standar, forum komunikasi yang berkelanjutan, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012). Tanpa kerangka kelembagaan yang kuat, kolaborasi antar pemangku kepentingan berpotensi terhambat oleh fragmentasi kewenangan, ketidakseimbangan kekuasaan, dan lemahnya akuntabilitas (Ansell & Gash, 2008).

Dalam praktik pengelolaan destinasi, kolaborasi sering menghadapi tantangan berupa kompleksitas birokrasi, ketidakkonsistenan dukungan kebijakan, serta keterlibatan masyarakat yang belum optimal. Studi tentang tata kelola pariwisata menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas partisipasi komunitas dan lemahnya integrasi antar aktor dapat mengurangi efektivitas pengelolaan destinasi dan memperbesar risiko degradasi lingkungan serta ketimpangan sosial (Baggio et al., 2010; Emerson et al., 2012). Oleh karena itu, penguatan tata kelola partisipasi menjadi krusial bagi destinasi pesisir seperti Pantai Tanjung Setia agar pertumbuhan wisata *sport tourism* dapat berjalan seimbang dengan konservasi pesisir dan keadilan sosial. Selain itu, literatur menekankan pentingnya mekanisme evaluasi dan *feedback* partisipatif dalam pengelolaan destinasi. Partisipasi publik dalam proses evaluasi kebijakan memungkinkan komunitas lokal menyampaikan penilaian dan rekomendasi perbaikan secara langsung, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal (Fung, 2006). Pendekatan ini membantu meningkatkan adaptivitas pengelolaan destinasi, meminimalkan dampak negatif terhadap

ekosistem pesisir, serta memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat (Reed, 2008).

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, dengan unit analisis berupa individu dan institusi yang terlibat dalam tata kelola destinasi. Unit individu mencakup masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata, dan wisatawan, sedangkan unit institusi meliputi pemerintah daerah serta kelompok atau organisasi pengelola destinasi. Unit analisis ini memperjelas bahwa kajian berfokus pada dinamika peran, bentuk partisipasi, serta pola interaksi antar aktor dalam mendukung pengelolaan destinasi secara berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam makna, persepsi, dan dinamika interaksi antar pemangku kepentingan dalam konteks sosial tertentu, khususnya pada pengelolaan pariwisata berbasis partisipasi dan keberlanjutan (Creswell & Poth, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), observasi lapangan, dan studi dokumentasi, yang merupakan teknik utama dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang kaya dan kontekstual (Merriam & Tisdell, 2016). Wawancara dilakukan secara purposif terhadap 10 informan, dipilih berdasarkan kriteria peran dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan destinasi, yaitu 2 orang dari Dinas Pariwisata sebagai pembuat kebijakan, 4 pelaku usaha pariwisata yang aktif dalam penyediaan layanan wisata, 3 pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang terlibat dalam program komunitas, dan 1 pengelola desa wisata sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Penentuan jumlah informan didasarkan pada prinsip *data saturation* dalam penelitian kualitatif, yaitu jumlah yang cukup untuk memperoleh informasi yang kaya, representatif dari perspektif berbagai pihak, dan memadai untuk menganalisis dinamika partisipasi masyarakat secara komprehensif. Selain itu, FGD melibatkan perwakilan dari Dinas Pariwisata sebanyak 2 orang, Dinas Lingkungan Hidup, sebanyak 2 orang, pelaku usaha 3 orang, pemandu wisata sebanyak 2 orang, Pokdarwis sebanyak 3 orang, dan pengelola desa wisata sebanyak 2 orang untuk menggali perspektif kolektif terkait tata kelola destinasi, koordinasi lintas sektor, serta pengelolaan dampak lingkungan dan sosial (Krueger & Casey, 2015).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Analisis tematik dipilih karena efektif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar data dalam penelitian kualitatif (Braun & Clarke, 2006). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan hasil wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi guna meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

Tabel 1  
Hasil Penelitian

No	Item Guideline Wawancara	Hasil Wawancara (Pasif)	Kategori Informan	Kode Informan
1	Peran pemerintah dalam tata kelola destinasi	Pelatihan SDM, perbaikan fasilitas, koordinasi event, serta promosi destinasi dilakukan oleh pemerintah daerah untuk	Pemerintah Daerah	IR 1, IR 2

		meningkatkan kualitas Pantai Tanjung Setia.		
2	Partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi	Jasa wisata, penyewaan alat selancar, homestay/losmen, dan usaha kuliner dikelola oleh masyarakat lokal sehingga pendapatan meningkat selama musim ramai dan event selancar.	Guide & Pelaku Usaha	IR 3, IR 4 (Guide), IR 5–IR 8 (Pelaku Usaha)
3	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial	Kegiatan bersih pantai, pengamanan, dan dukungan event dilakukan secara swadaya oleh Pokdarwis dan masyarakat, mendorong keberlanjutan destinasi dan kohesi sosial komunitas.	Pokdarwis	IR 9–IR 11
4	Dampak partisipasi terhadap kesejahteraan	Pendapatan masyarakat dan pelaku usaha meningkat saat musim ramai atau event berlangsung, namun distribusi manfaat ekonomi lebih besar pada pemilik usaha dengan modal dan jaringan pariwisata.	Pelaku Usaha	IR 5–IR 8
5	Partisipasi tahap pengawasan	Pengawasan kebersihan dan keamanan dilakukan secara informal oleh Pokdarwis dan guide, melalui pengingat dan koordinasi spontan karena belum ada SOP resmi.	Pokdarwis & Guide	IR 3, IR 4 (Guide), IR 9–IR 11
6	Partisipasi tahap perencanaan dan evaluasi	Partisipasi masyarakat dalam rapat perencanaan dan evaluasi masih terbatas, dengan masukan lebih sering berupa saran informal; keterlibatan Pokdarwis sebagai fasilitator komunitas menjadi penghubung antara warga dan pengelola destinasi.	Pokdarwis & Desa Wisata	IR 9–IR 11, IR 12
7	Kebutuhan pelatihan dan penguatan kapasitas	Pelatihan hospitality, pengelolaan wisata, dan forum rutin diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi secara sistematis dan inklusif.	Pemerintah Daerah & Desa Wisata	IR 1, IR 2, IR 12

Sumber: Peneliti (2025)

## PEMBAHASAN

### Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pantai Tanjung Setia

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi Pantai Tanjung Setia muncul dalam dua bentuk utama: partisipasi ekonomi dan partisipasi sosial. Pada aspek ekonomi, masyarakat terlibat dalam rantai layanan pariwisata melalui homestay/losmen, warung makan dan UMKM kuliner, jasa transportasi lokal, pemandu wisata, serta penyewaan alat selancar. Bentuk partisipasi ini mencerminkan prinsip *community-based tourism* yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari aktivitas wisata (Tosun, 2006; Arsyad, 2025). Salah satu guide mengungkapkan bahwa “*sebagai pemandu lokal, kami ikut menyediakan jasa wisata dan alat selancar, sehingga pendapatan kami ikut meningkat ketika ada wisatawan ramai*”, menegaskan keterlibatan masyarakat dalam rantai nilai ekonomi destinasi.

Selain partisipasi ekonomi, masyarakat menunjukkan partisipasi sosial melalui gotong royong, aksi bersih pantai, dukungan penyelenggaraan event selancar, serta menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan. Informan dari Pokdarwis menyatakan bahwa *“kegiatan bersih pantai dan pengamanan biasanya kami lakukan secara swadaya, terutama kalau mau ada event atau wisatawan mulai ramai”*. Pandangan ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa partisipasi sosial penting untuk menjaga kualitas destinasi dan memperkuat kohesi komunitas lokal (Ruiz-Ballesteros & del Campo Tejedor, 2020; Arsyad, 2025).

Keterlibatan masyarakat dalam aspek ekonomi dan sosial berdampak positif terhadap kesejahteraan lokal, ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan, bertambahnya lapangan kerja, stabilitas usaha, dan akses terhadap pelatihan serta peluang usaha yang lebih berkelanjutan. Informan pelaku usaha menyatakan bahwa *“kalau ada event selancar atau musim ramai, omzet homestay dan warung bisa naik cukup signifikan dibanding hari biasa”*. Temuan ini mendukung hasil penelitian Escamis & Hinlayagan (2024) yang menekankan hubungan positif antara partisipasi komunitas dan keberlanjutan sosial-ekonomi pariwisata. Meski demikian, distribusi manfaat ekonomi belum merata. Masyarakat dengan modal, aset, atau jaringan pariwisata memperoleh keuntungan lebih besar dibanding kelompok yang keterlibatannya masih terbatas. Salah satu pelaku usaha menyampaikan, *“yang paling terasa memang yang sudah punya usaha dari awal, kalau warga yang belum punya modal biasanya cuma ikut-ikutan saja”*. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat fungsional dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam pengelolaan destinasi (Pretty, 1995; Tosun, 2006).

Dilihat dari tahapan pengelolaan destinasi, partisipasi masyarakat paling dominan pada tahap pelaksanaan, meliputi operasional wisata, gotong royong, dan kebersihan kawasan. Pada tahap pengawasan, partisipasi masyarakat muncul dalam bentuk inisiatif menjaga keamanan dan kebersihan, namun masih informal. Informan Pokdarwis menyebutkan, *“kami biasanya saling mengingatkan saja, belum ada jadwal atau aturan tertulis soal kebersihan dan pengawasan”*. Informan guide menambahkan, *“kadang kami harus mengingatkan pengunjung dan pedagang agar tetap menjaga kebersihan, karena belum ada SOP resmi dari pengelola”*. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsistensi pengelolaan fasilitas dan lingkungan masih belum optimal (Escamis & Hinlayagan, 2024). Misalnya, fasilitas kurang terawat atau sampah tidak tertangani rutin, sehingga menurunkan kenyamanan dan pengalaman wisatawan serta memengaruhi citra destinasi. Pada tahap perencanaan dan evaluasi, partisipasi masyarakat masih terbatas. Informan Pokdarwis menyatakan, *“masyarakat jarang dilibatkan dalam rapat perencanaan, biasanya hanya diminta pendapat secara informal”*. Masukan warga lebih sering berbentuk saran atau keluhan individual, bukan mekanisme partisipatif yang terstruktur. Pola ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum mencapai tingkat kolaboratif, sehingga penguatan kelembagaan, SOP, dan ruang deliberasi menjadi kebutuhan penting untuk mewujudkan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan dan inklusif (Pretty, 1995; Arsyad, 2025).

### **Peran Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat Lokal dalam Membangun Destinasi Wisata Berkelanjutan di Pantai Tanjung Setia**

Pembangunan destinasi wisata berkelanjutan di Pantai Tanjung Setia melibatkan peran multipihak yang saling bergantung, yaitu pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Efektivitas pengelolaan destinasi sangat ditentukan oleh kejelasan fungsi masing-masing aktor serta kualitas kolaborasi yang terbangun di antara mereka. Kerangka *collaborative governance* menekankan bahwa pengelolaan isu publik yang kompleks, termasuk pariwisata pesisir, memerlukan keterlibatan lintas aktor secara setara dan berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). Pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Pariwisata, berperan sebagai pengarah dan fasilitator utama dalam tata kelola destinasi. Peran tersebut mencakup penyusunan kebijakan, pembinaan kelembagaan, promosi destinasi, dukungan penyelenggaraan event, perbaikan infrastruktur dasar, serta

peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pelayanan, pemanduan, dan keselamatan pantai. Salah satu informan dari Dinas Pariwisata menyatakan bahwa *“pemerintah fokus menyiapkan regulasi, promosi, dan pelatihan agar masyarakat siap menerima wisatawan dan destinasi bisa berkembang berkelanjutan”*. Informan lainnya menambahkan bahwa *“koordinasi lintas OPD sangat penting, terutama untuk urusan kebersihan pantai, keamanan wisatawan, dan perlindungan lingkungan”*. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa peran negara penting dalam menciptakan kerangka kolaborasi yang kondusif bagi aktor non-negara (Emerson et al., 2012).

Peran koordinatif pemerintah juga menjadi krusial dalam menyatukan kerja lintas sektor dan lintas instansi, terutama pada isu lingkungan pesisir yang kompleks. Pengelolaan destinasi wisata pantai memerlukan sinergi antara dinas pariwisata, lingkungan hidup, perhubungan, serta aparat keamanan agar kebijakan dan implementasi tidak berjalan parsial. Literatur menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi dan perbedaan kepentingan antar pihak sering menjadi hambatan utama dalam tata kelola destinasi pesisir (Baggio et al., 2010; Reed, 2008). Pelaku usaha pariwisata berkontribusi melalui penyediaan amenities dan layanan, investasi, promosi, serta penciptaan peluang kerja bagi masyarakat lokal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pelaku usaha perlu diimbangi dengan tanggung jawab lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah dan perlindungan ekosistem pesisir agar pertumbuhan wisata tidak merusak daya tarik utama Pantai Tanjung Setia. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa kolaborasi destinasi sering terkendala apabila peran sektor swasta lebih berorientasi ekonomi tanpa diiringi komitmen keberlanjutan lingkungan (Baggio et al., 2010; Reed, 2008).

Sementara itu, masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah destinasi, pelaku ekonomi wisata, sekaligus penggerak kelembagaan lokal seperti Pokdarwis dan desa wisata. Dua informan dari desa wisata menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural. Salah satu informan menyatakan, *“kami menjaga kenyamanan wisatawan dan budaya lokal karena pantai ini juga identitas desa kami”*, sedangkan informan lainnya menyebutkan bahwa *“masyarakat sudah terlibat di homestay dan kuliner, tapi masih jarang diajak bicara soal rencana besar pengembangan pantai”*. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi aktif, namun belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses strategis pengelolaan destinasi. Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal di Pantai Tanjung Setia sudah mulai terbentuk, tetapi masih memerlukan penguatan pada dimensi perencanaan, kelembagaan, dan pengambilan keputusan agar manfaat pembangunan pariwisata lebih inklusif dan berkelanjutan. Tingkat partisipasi masyarakat saat ini masih dominan pada level operasional dan konsultatif, belum sepenuhnya mencapai partisipasi kolaboratif yang setara. Hal ini sejalan dengan tipologi partisipasi dalam tata kelola kompleks yang menekankan pentingnya perluasan ruang deliberasi dan pengambilan keputusan bersama untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang (Fung, 2006; Ansell & Gash, 2008).

### **PENUTUP**

Partisipasi masyarakat di Pantai Tanjung Setia berkontribusi signifikan terhadap aspek ekonomi dan sosial destinasi, namun peran mereka masih terbatas pada pelaksanaan kegiatan rutin, sementara keterlibatan strategis dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pengelolaan destinasi belum optimal, sehingga peluang untuk meningkatkan keberlanjutan dan distribusi manfaat secara lebih merata masih terbuka. Peran pemerintah terbukti menjadi kunci dalam menetapkan kebijakan, menyediakan fasilitas, dan memfasilitasi koordinasi antar aktor, sementara pelaku usaha berperan utama dalam memberikan pelatihan, peluang kerja, dan akses pasar, sehingga keduanya menentukan efektivitas peningkatan kapasitas masyarakat dan kelancaran pengelolaan destinasi. Penguatan pengelolaan destinasi dapat dilakukan melalui pembentukan forum partisipatif rutin yang melibatkan masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah dalam

perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program wisata. Selain itu, perlu diselenggarakan pelatihan kapasitas berbasis kebutuhan, seperti manajemen homestay, layanan pemandu wisata, kewirausahaan UMKM, dan praktik keberlanjutan lingkungan. Untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata, pemerintah dan pengelola destinasi dapat menerapkan skema kemitraan atau subsidi modal mikro, serta program prioritas kerja lokal agar peluang usaha dan pendapatan tersebar secara adil di antara warga masyarakat. Partisipasi masyarakat yang sistematis di tahap pengawasan dan evaluasi akan memastikan kualitas layanan, kebersihan, dan keamanan destinasi terjaga secara konsisten.

## REFERENSI

- Afandi, M., Afandi, S. A., Erdayani, R., & Afandi, N. H. (2024). Sustainable tourism and community participation in Indonesia: Comparative insights from Bali, Yogyakarta, and Labuan Bajo. *Indonesian Tourism Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.69812/itj.v2i3.198>
- Ariasri, N. R., & Susianti, H. W. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pemulihan pariwisata pada era new normal di KSPN Bedugul. *Jurnal Kepariwisataaan*, 21(1), 22–29. <https://doi.org/10.52352/jpar.v21i1.728>
- Arsyad, Y. (2025). Pariwisata berbasis komunitas sebagai strategi pemberdayaan: Tinjauan konseptual dari perspektif pendidikan nonformal. *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, 9(2), 75–88. <https://doi.org/10.26740/jpus.v9n2.p75-88>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Baggio, R., Scott, N., & Cooper, C. (2010). Improving tourism destination governance: A complexity science approach. *Tourism Review*, 65(4), 51–60. <https://doi.org/10.1108/16605371011093863>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781506330204>
- Danisa, I., Ikhtiarti, E., & Rini, S. (2025). Development of a French tourism promotional video for Tanjung Setia Beach, Pesisir Barat, Lampung. *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya*, 5(02), 66–80. <https://doi.org/10.12259/jsib.v5i02.44184>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Escamis, J. E., & Hinlayagan, K. R. (2024). Community-based tourism implementation as mediator on the relationship between community participation and socio-economic sustainability of tourism. *American Journal of Tourism and Hospitality*, 2(1), 93–104. <https://doi.org/10.54536/ajth.v2i1.3629>
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66–75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- Kompas.id. (2025, June 9). Pantai Tanjung Setia, “Panggung” peselancar dunia di ujung barat Lampung. *Kompas*. Retrieved from <https://www.kompas.id/artikel/pantai-tanjung-setia-panggung-peselancar-dunia>
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus groups: A practical guide for applied research* (5th ed.). Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781483395472>
- Maifizar, A., Natasya, S., & Angriani, D. (2025). Empowering coastal communities through ecotourism development. *Jurnal Masyarakat Maritim*. <https://doi.org/10.31629/ct2gpk93>

- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass. <https://doi.org/10.1002/9781119176836>
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)
- Putra, A. T., & Suroso, D. S. A. (2025). Penerapan community based tourism dalam pengelolaan potensi wisata bahari secara berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran. *Journal of Tourism Destination and Attraction*, 11(1). <https://doi.org/10.35814/tourism.v11i1.4807>
- Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: A literature review. *Biological Conservation*, 141(10), 2417–2431. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.07.014>
- Ridho, S. L. Z. (2025). The community participation in tourism sustainability and tourist satisfaction: A study of post visit behaviour to cultural destinations in Palembang City. *International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events*, 5(1), Article 2115. <http://dx.doi.org/10.31940/ijaste.v5i1.2115>
- Ridho, S. L. Z., Paisal, Mellita, D., & Roseno, M. T. (2021). The community participation in tourism sustainability and tourist satisfaction: A study of post-visit behaviour to cultural destinations in Palembang City. *International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events*, 5(1), 53–63. <http://dx.doi.org/10.31940/ijaste.v5i1.2115>
- Rohim, R., Supriyadi, I., Wulandari, W., & Setyo Ing Budhi, W. (2025). Community participation in sustainable tourism management at Cemara Beach, Mojomulyo Village, Jember Regency. *International Social Sciences and Humanities*, 1(2), Article 194. <https://doi.org/10.32528/iss.v1i2.194>
- Ruiz-Ballesteros, E., & del Campo Tejedor, A. (2020). Community-Based Tourism as a Factor in Socio-Ecological Resilience: Economic Diversification and Community Participation in Floreana (Galapagos). *Sustainability*, 12(11), 4724. <https://doi.org/10.3390/su12114724>
- Segara, I. A. A. A. (2025). Coastal tourism development and sustainability: A global and Indonesian perspective. *Bali Tourism Journal*, 9(2). <https://doi.org/10.36675/btj.v9i2.134>
- Syafitri, R., Elsera, M., Wahyuni, S., Solina, E., & Arieta, S. (2023). Engaging community participation in coastal tourism: A community based tourism approach in Tanjung Siambang Riau Islands. In *Proceedings of the 2nd Maritime Continent Fulcrum International Conference* (pp. \_\_\_\_). EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.28.2022.2328377>
- Triparty, A., Nursyamsu, L., Rahmad, F. N., Salsabila, A., Adinda, N. P., Fahira, J., & Putri, A. F. (2025). Community awareness and its impact on tourism infrastructure development in the coastal area of Kampung Tua Nongsa Pantai. *Journal of Architectural Design and Development (JAD)*, 6(1). <https://doi.org/10.37253/jad.v6i1.10390>
- Tosun, C. (2006). Expected nature of community participation in tourism development. *Tourism Management*, 27(3), 493–504. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.12.004>
- Wibowo, M. S., & Belia, L. A. (2025). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, 6(1). <https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i1.58108>

#### **BIODATA PENULIS**

**Audy Octavia** adalah mahasiswa Program Studi Magister Pariwisata di Universitas Pelita Harapan dengan latar belakang pendidikan di bidang Manajemen. Ia memiliki minat yang besar dalam penelitian pengelolaan destinasi wisata, khususnya yang menekankan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Audy fokus mempelajari bagaimana keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal dapat memperkuat

pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan dan inklusif. Melalui studi dan risetnya, ia berusaha mengembangkan strategi yang mampu meningkatkan kolaborasi antar pihak serta mendorong keberhasilan destinasi wisata dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain akademik, Audy juga aktif mengikuti seminar dan kegiatan praktis yang mendukung pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Dengan perpaduan latar belakang manajemen dan ketertarikan pada pariwisata, Audy berambisi memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan di Indonesia.

**Meitolo Hulu** adalah dosen di Program Magister Pariwisata Universitas Pelita Harapan. Ia memiliki fokus penelitian pada bidang pariwisata berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, dan pengembangan kawasan wisata pesisir. Dengan latar belakang akademik yang kuat di bidang kajian pariwisata dan pengalaman praktis, Meitolo Hulu aktif mengkaji bagaimana pariwisata dapat dikembangkan secara inklusif dan ramah lingkungan, terutama di daerah pesisir yang memiliki potensi wisata tinggi. Selain mengajar, ia juga terlibat dalam berbagai proyek penelitian yang mendukung pemberdayaan masyarakat lokal dan konservasi sumber daya alam. Meitolo Hulu berkomitmen untuk menghubungkan teori dan praktik melalui kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas setempat. Karyanya berkontribusi pada pengembangan strategi pengelolaan destinasi yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia secara umum.